

IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DAN HAK MEMBELA DIRI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN TEMANGGUNG

INTISARI

Wishnu Hayu K,* Supriyadi**

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis implementasi asas praduga tak bersalah dan hak membela diri dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 di Wilayah Hukum Kabupaten Temanggung, serta mengkaji dan merumuskan prospek penyelesaian pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yaitu penggabungan dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Hal tersebut dikarenakan penelitian dalam tesis ini menggunakan 2 (dua) data, yaitu data primer dan data sekunder. Pencarian data primer dilakukan dengan metode wawancara secara langsung kepada responden dan narasumber dengan alat pengumpul data berupa melampirkan daftar pertanyaan di atas selembar kertas yang akan dijawab secara langsung oleh responden dan narasumber. Pencarian data sekunder dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dengan alat pengumpul data berupa studi dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Perma Tilang), lebih memberikan perlindungan terhadap pelanggar lalu lintas, karena diakomodir oleh Pasal 267 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana pelanggar lalu lintas diberikan pilihan untuk menghadiri sidang atau tidak menghadiri sidang tilang, namun setelah lahirnya Perma Tilang, tidak memberikan ruang bagi pelanggar untuk menghadiri persidangan dan memberikan keterangan terkait pembelaannya, agar dapat dipertimbangkan dan diputus secara adil, sehingga penerapan asas praduga tak bersalah tidak dapat diterapkan. *Kedua*, Prospek penanganan perkara pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang, sebaiknya lebih mengedepankan upaya preventif hingga represif, dengan memberikan edukasi dan sosialisasi untuk mendorong percepatan budaya tertib berlalu lintas di Masyarakat, sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Kata Kunci: Asas Praduga Tak Bersalah, Hak Membela Diri, Pelanggaran Lalu Lintas

* Mahasiswa Magister Hukum Litigasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

** Dosen Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

**IMPLEMENTATION THE PRESUMPTION OF INNOCENCE AND THE
RIGHT TO DEFEND ONE SELF IN THE SETTLEMENT OF TRAFFIC
VIOLATIONS CASES IN THE LEGAL AREA OF
TEMANGGUNG DISTRICT**

ABSTRACT

Wishnu Hayu K,* Supriyadi**

This study is aimed at determining and analyzing implementation the presumption of innocence and the right to defend one self in the settlement of traffic violations cases before and after the enactment of Supreme Court regulation number 12 of 2016 in the legal area of Temanggung district, as well as reviewing and formulation prospects for resolving traffic violations in the legal area of Temanggung district in the future.

This research uses empirical normative research method which is a combination of normative legal research and empirical legal research. That is because the research in this thesis uses 2 (two) data, namely primary data and secondary data. The primary data collection is done by interviewing the respondents and the informant. Secondary data collection is done by means of library research in the form of document studies.

Based on the results of research and discussion concluded as follows: First, law enforcement against traffic violations prior to the existence of Supreme Court Regulation Number 12 of 2015 concerning procedures for resolving traffic violation cases (Perma Tilang), provide more protection against traffic violators, because it is accommodated by Article 267 of law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, where traffic offenders are given the option to attend the trial or not attend the ticketing trial, but after the birth of the Tilang Perma, does not provide space for the offender to attend the trial and provide information related to his defense, so that it can be considered and decided fairly, so that the application of the presumption of innocence can not be applied. Second, the prospect of handling traffic violation cases in the legal area of Temanggung district in the future, better to prioritize preventive to repressive efforts, by providing education and socialization to encourage the acceleration of a culture orderly traffic in the community, so as to reduce the occurrence of traffic violations.

Keywords: The Presumption of Innocence, The Right to Defend One Self, Traffic Violations

* Student of Master in Litigation Law, Law Faculty Postgraduate Program, Universitas Gadjah Mada.

** Lecturer of Law Faculty, Universitas Gadjah Mada